

ANALISIS FAKTOR INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN FORCED LABOR PREVENTION ACT ERA JOE BIDEN TERHADAP ISU UIGHUR

Fauziah Athalia Savitri¹, Firsty Chintya Laksmi Perbawani²

^{1,2}Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id

Abstract

The issue of human rights violations committed by China against the ethnic Uyghurs in Xinjiang has become a serious concern for the international community. This issue arose after the construction of re-education camps by the Chinese government which was claimed as a deradicalization effort, but reported by Human Rights Watch and Amnesty International as a form of mass detention. The United States responded by formulating a foreign policy, although during the Donald Trump administration its implementation was delayed due to considerations of trade relations with China. This study aims to analyze the international factors that drive changes in the direction of US foreign policy from the Trump era to the Joe Biden era, specifically through the Uyghur Forced Labor Prevention Act policy. This research uses an explanatory method with a qualitative approach and secondary data collection techniques through literature studies. The results show that policy changes are driven by global factors such as international pressure, regional factors related to Central Asian stability, bilateral factors in US-China relations, and pressure from non-state actors. The four factors collectively shape the dynamics of a more assertive US foreign policy towards the issue of human rights violations in Xinjiang.

Keywords: *United States, Ethnic Uyghurs, Foreign Policy, China, Human Rights Violations*

Abstrak

Kemunculan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang menjadi perhatian serius komunitas internasional. Isu ini mencuat setelah pembangunan kamp re-education oleh pemerintah Tiongkok yang diklaim sebagai upaya deradikalisasi, namun dilaporkan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International sebagai bentuk penahanan massal. Amerika Serikat merespons dengan merumuskan kebijakan luar negeri, meskipun pada masa pemerintahan Donald Trump implementasinya tertunda karena pertimbangan hubungan dagang dengan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internasional yang mendorong perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari era Trump ke era Joe Biden, khususnya melalui kebijakan Uyghur Forced Labor Prevention Act. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan didorong oleh faktor global seperti tekanan internasional, faktor regional terkait stabilitas Asia Tengah, faktor bilateral dalam hubungan AS-Tiongkok, serta tekanan dari aktor non-negara. Keempat faktor ini secara kolektif membentuk dinamika kebijakan luar negeri AS yang lebih tegas terhadap isu pelanggaran HAM di Xinjiang.

Kata kunci: *Amerika Serikat, Etnis Uighur, Kebijakan Luar Negeri, Tiongkok, Pelanggaran HAM*

A. Pendahuluan

Pada tahun 2017, Tiongkok melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada etnis Uighur dengan mengeluarkan sebuah kampanye intensif dan membangun suatu kamp untuk etnis Uighur yang kemudian dinamakan kamp *re-education*. Tujuan dari kampanye dan pembangunan kamp *re-education* adalah untuk mendidik kembali masyarakat Xinjiang yang dianggap telah terkena sebuah doktrin *ekstrimisme* dan *separatism* (BBC, 2018). Tindakan ini dianggap Tiongkok sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme, dikarenakan mayoritas dari etnis Uighur beragama Islam. Kamp *re-education* ini pada awalnya di sambut dan diterima dengan baik oleh masyarakat Xinjiang yang di anggap dapat meningkatkan pendidikan di wilayah Xinjiang, namun seiring berjalannya waktu diketahui bahwa di dalam kamp *re-education* telah melakukan tindak kekerasan dan penahanan massal kepada etnis Uighur (BBC, 2022). Di dalam Kamp *re-education*, warga Xinjiang juga diberikan arahan agar berhati-hati akan bahayanya ektremisme agama dan mengajak warganya untuk mendukung “kediktatoran” demi menghapuskan ekstremis islam di Tiongkok, pemerintahan Tiongkok juga beranggapan bahwa sebagian besar dari kaum Uighur telah tergabung dalam kelompok militanan *Islamic State* (Antoni, M, S, & Zilvania P, 2022). Tindakan kekerasan dan penahanan massal etnis Ughur ini kemudian diketahui oleh negara-negara internasional melalui laporan yang diperoleh dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*, terkuaknya permasalahan ini menjadikan Amerika Serikat (AS) dengan cepat turun tangan dalam merumuskan kebijakan khusus terkait isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur (America, 2021).

Tabel 1. Jumlah Tahanan di Kamp Re-education

Tahun	Jumlah
2017	800.000 -1.000.000
2018 – 2019	1.500.000
2020	1.800.000
2021	1.890.000
2022	1.984.500
2023	2.083.725
2024	2.187.911,25

Sumber: (International, 2021)

Berdasarkan data tersebut, jumlah tahanan di kamp *re-education* tiap tahunnya meningkat. Dimulai pada tahun 2017, jumlah tahanan sebesar 800.000 orang hingga 1.000.000, namun jumlah tahanan tiap tahunnya semakin melonjak tinggi. Hingga di tahun 2020 hingga 2024, jumlah tahanan meningkat sebesar 1.800.000 – 2.100.000.00 dan pada tahun 2020, AS mengeluarkan kebijakan luar negerinya sebagai bentuk respon mereka dalam menghadapi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok kepada etnis Uighur yang dinamakan *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA) yang ditandatangani oleh Donald Trump pada tanggal 17 Juni 2020 (Diplomat, 2023). Kebijakan ini memberikan sanksi kepada Tiongkok berupa sanksi ekonomi dan pembatasan visa kepada para pejabat Tiongkok yang secara adil ikut melakukan tindakan pelanggaran HAM kepada etnis Uighur (Gov, 2020). Namun, pemberian sanksi kebijakan *Uyghur Human Rights Policy* mengalami penundaan karena kala itu AS dan Tiongkok sedang menjalin hubungan mitra dagang dan hal ini secara langsung diungkapkan oleh presiden Donald Trump kepada media Axios (Axios, 2020). Penundaan ini tentu menunjukkan bahwa AS tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hingga memasuki era kepemimpinan Joe Biden nama kebijakan *Uyghur Human Rights Policy Act* berubah nama menjadi *Uyghur Forced Labor Prevention Act* yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2021 dan dijalankan pada tahun 2022 (State, 2024). Kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* memiliki fokus dalam menghentikan kerja paksa yang dilakukan oleh Tiongkok tanpa adanya persetujuan ataupun keinginan warga etnis Uighur.

Tindakan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri hingga mengubah nama dan isi kebijakannya diharapkan dapat membantu kaum muslim Uighur untuk bisa mendapatkan kembali hak asasi manusia mereka. Meskipun banyak artikel ataupun pembahasan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok dan tanggapan Amerika Serikat, yang membedakan penelitian ini adalah terjadinya perubahan kebijakan luar negeri saat memasuki era kepemimpinan Joe Biden. Perubahan kebijakan ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah faktor internasional yang dilihat dengan menggunakan teori Joakim Eidenfalk (Eidenfalk, 2006).

Tinjauan pustaka dari penelitian ini dilihat dari 2 penelitian yang sebelumnya telah ditulis oleh penulis lain, penelitian sebelumnya oleh Amelia Oktavia Martins, Christian H.J de Fretes, Roberto Octovianus Cornelis Seba dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif

Amnesty Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Etnis Uighur Di Tiongkok Tahun 2016-2021” membahas gambaran dari bagaimana perspektif *Amnesty Internasional* terhadap pelanggaran HAM dan upaya yang dilakukan mereka untuk mengangkat isu ini ke tingkat internasional (Martins, Fretes, & Seba, 2023). Fokus utama penelitian ini terletak pada peran aktor non negara (NGO internasional) dan mekanisme advokasi internasional yang memiliki hubungan terhadap terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui faktor internasional.

Penelitian lainnya yang berjudul “*Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki atas Perundingan Etnis Uighur*” oleh Moh. Fathoni Hakim, Denimah, Devy Febrian Arisandy Bahtiar, Muhammad Zulfikar Ramadhan, Feryan Airlangga, Muhammad Zulfikar Ramadhan, Feryan Airlangga, dan Stefano Jalu Sambowo Putra. Penelitian ini membahas hubungan Turki dengan Tiongkok, mengingat bahwa etnis Uighur merupakan keturunan dari Turkestan. Hubungan antara kedua negara tersebut sempat mengalami kerenggangan namun kedua belah pihak hingga saat ini masih tetap melangsungkan hubungan bilateral mereka dengan baik (Moh. Fathoni Hakim, et al., 2021). Fokus utamanya terletak pada pengaruh faktor identitas etnis dan hubungan bilateral dalam merespons isu HAM, yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri.

B. Metode Penelitian

Dalam meneliti Analisis Kebijakan *Forced Labor Prevention Act* di Era Joe Biden dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Etnis Uighur, tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif menurut Ulber Silalahi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu hubungan antara 2 variabel yakni sebab dan akibat untuk dapat mengetahui bagaimana suatu fenomena dapat terjadi (Silalahi, 1999). Dalam penelitian ini, variabel sebab adalah faktor internasional di AS, dan variabel akibatnya adalah perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok dalam isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan data sekunder dengan melihat data-data yang sebelumnya sudah diteliti lebih dulu oleh penulis lain. Data sekunder yang penulis gunakan bersifat studi pustaka, sebagai suatu kegiatan penulis yang mencari data dengan cara membaca, mengolah dari bahan penelitian yang telah ada sebelumnya, data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen resmi pemerintah AS, media massa, dan publikasi lainnya (Supriyadi, 2016).

C. Pembahasan dan Temuan

Perubahan kebijakan luar negeri menurut teori Joakim Eidenfalk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor terjadinya perubahan kebijakan adalah faktor luar negeri yang akhirnya membuat AS memutuskan untuk mengubah kebijakan mereka terhadap Tiongkok atas permasalahan pelanggaran HAM. (Eidenfalk, 2006) menyebutkan bahwa di dalam faktor internasional terdapat 4 faktor penyebab, antara lain:

Faktor Global; Respon PBB dan UHCHR

Pada faktor ini PBB secara langsung ikut turun tangan dalam memberikan respon dan tindakan untuk menghentikan perlakuan Tiongkok kepada etnis Uighur. PBB sejauh ini telah melakukan monitoring dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran ham Uighur yang dilakukan Tiongkok dan hasil yang telah didapatkan PBB berupa laporan dari *UN High Commissioner of Human Rights*, yakni Michelle Bachelet yang memberikan laporan terkait pemerintahan Tiongkok yang melakukan pembatasan wilayah, pemisahan keluarga, bahkan hingga memutuskan kontak Uighur dengan negara lain yang akhirnya menghasilkan pola menghasilkan pola intimidasi dan ancaman terhadap etnis Uighur apabila membicarakan tentang kondisi mereka di Xinjiang (Nations, 2022). OHCHR juga ikut menambahkan pemerintah Tiongkok seharusnya memegang tugas utama untuk bisa memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan dimasukkan ke dalam kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan tidak seharusnya melakukan tindakan pelanggaran HAM (Nations, 2022). Tiongkok sudah sewajibnya mengikut hukum internasional dari hak asasi manusia. OHCHR juga meminta Tiongkok untuk memastikan pertanggungjawaban bagi para pelaku, dan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban yang telah mengalami penyiksaan selama di kamp *re-education* (Nations, 2022).

Faktor Regional; Pengambilan Wilayah Xinjiang oleh Tiongkok

Pada awalnya XUAR (Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) atau dulunya disebut dengan Turkistan Timur merupakan suatu wilayah yang berada di Tiongkok Barat dengan sebagian wilayahnya mencakup seperenam daratan milik Tiongkok (Bhattacharji, 2012). Bahkan Asosiasi Uighur Amerika (UAA) menyebutkan bahwa Turkistan Timur bukanlah bagian dari Tiongkok, melainkan bagian dari Asia Tengah (Bhattacharji, 2012). Di dalam

wilayah Xinjiang yang merupakan rumah bagi kelompok etnis Muslim yang berbahasa Turki dan memiliki total penduduk 18 juta jiwa (Watch, 2001).

Tabel 2. Jumlah Etnis dan Penduduk di Xinjiang

Etnis di Xinjiang	Jumlah penduduk
Etnis Uighur	8.000.000 penduduk
Etnis Kazakh	1.200.000 penduduk
Etnis Tioghoa (Han)	7.5000.000 penduduk

Sumber: (Watch, 2001)

Pada tabel di atas, terdapat etnis Uighur dengan total 8 juta jiwa dan merupakan kelompok etnis terbesar di Xinjiang, etnis Kazakh dengan total 1,2 juta jiwa, dan etnis Tionghoa (Han) yang populasinya telah meningkat sebesar 6 persen hingga 40 persen dengan total 7,5 juta jiwa (Watch, 2001). Namun, pengambilan wilayah Xinjiang yang dilakukan oleh Tiongkok pada tahun 1884 menjadikan nama Turkistan Timur diubah menjadi nama Xinjiang dengan arti “perbatasan baru”. Pada awalnya, di dalam kehidupan sosial Xinjinag, etnis Uighur merupakan etnis yang mayoritas atau paling banyak tinggal di Xinjiang dan seiring berjalannya waktu, secara perlahan etnis Uighur tergusurkan oleh etnis Tionghoa (Han) yang melakukan migrasi secara besar-besaran ke Xinjiang (Moh. Fathoni Hakim, et al., 2021).

Faktor Bilateral; Hubungan Perang Dagang AS dengan Tiongkok

AS pada masa kepemimpinan Donald Trump mengalami kesitegangan perang dagang dengan Tiongkok yang bermula pada tahun 2018 dalam perebutan pasar ekonomi hingga menciptakan ketegangan ekonomi global (GAO, 2024). Disisi lain, AS juga menjalin hubungan mitra dagang dengan Tiongkok yang dianggap dapat memberikan win-win solution dalam mengatasi perang dagang antar kedua negara dalam beberapa tahun terakhir (GAO, 2024). Namun, adanya hubungan mitra dagang ini menjadikan AS memutuskan menunda pemberian sanksi kebijakan Uyghur Human Rights Policy kepada Tiongkok. Melalui wawancara Donald Trump dengan media Axios, Trump menyebutkan bahwa AS saat ini sedang dalam posisi kesepakatan perdagangan besar dengan Tiongkok dengan jumlah sebesar US\$250 miliar sehingga tidak memungkinkan bagi AS memberikan sanksi kepada Tiongkok karena dapat berimbas pada perekonomian negara (Axios, 2020). Adanya penundaan sanksi menjadikan warga AS mengkritik pemerintahannya karena menganggap telah menyepelekan permasalahan

pelanggaran HAM (BBC, 2020). Hal ini menjadikan era kepemimpinan Joe Biden memutuskan untuk membuat kebijakan luar negeri yang baru, hingga terbentuklah kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention act*.

Faktor *Non State Actor*; Laporan *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional*

Adanya laporan yang bermunculan dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional* sebagai aktor non negara yang berfokus pada isu-isu pelanggaran HAM di dunia mendorong AS dalam merubah kebijakan luar negerinya. Laporan yang diberikan oleh *Human Rights Watch* dengan judul '*China's Global Threat to Human Rights*' membahas Tiongkok yang mengeluarkan kampanye *strike hard* yakni kampanye melawan terorisme pada tahun 2014 dan hingga kini terus berlanjut terhadap etnis Uighur (Watch, 2020). *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa pada bulan Maret, otoritas Xinjiang mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menangkap hampir 13.000 teroris dan saat ini telah di tahan di dalam kamp *re-education*. Tiongkok secara terbuka menyebutkan bahwa sebagian besar tahanan telah di lepaskan kembali ke masyarakat namun tidak satu pun klaim tersebut didukung dengan bukti nyata atau kredibel (Watch, 2020). Beberapa laporan media pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kenyataan dari orang-orang yang telah dibebaskan ternyata ditugaskan ke pabrik untuk kerja paksa tanpa adanya consent dari orang-orang tersebut. Laporan *Human Rights Watch* menunjukkan salah satu ucapan dari etnis uighur yang berkewarganegaraan eropa yang mengatakan,

"It doesn't matter where I am, or what passport I hold.

[Chinese authorities] will terrorize me anywhere,

and I have no way to fight that". (Watch, 2020)

Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah memberikan tekanan dan teror bagi etnis Uighur atas penahanan massal yang mereka alami selama di kamp *re-education*. etnis Uighur tidak memiliki kesempatan untuk melawan, bahkan mereka tidak bisa menggunakan hak asasi manusia mereka. Sementara pada laporan *Amnesty Internasional* yang berjudul "*Like We Were Enemies in a War*": *China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang*, membahas perlakuan Tiongkok kepada etnis Uighur di dalam kamp *re-education* (International, 2021). Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa bulan Oktober 2019 dan Mei 2021, *Amnesty Internasional* telah melakukan wawancara kepada puluhan mantan tahanan dan

orang lainnya yang berada di Xinjiang sejak tahun 2017, sebagian besar dari yang di wawancarai tidak pernah berbicara secara terbuka terkait pengalaman mereka sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan kesaksian yang diberikan oleh mantan tahanan ini memberikan jumlah yang signifikan dari bukti-bukti kesaksian publik tentang situasi di kamp re-education sejak tahun 2017 (International, 2021). Beberapa dari orang-orang yang diwawancarai oleh *Amnesty Internasional* mengatakan alasan penahanan yang diberikan kepada mereka bukanlah semata karena mereka melakukan tindak kriminal atau tindakan yang melanggar hukum, melainkan tahanan diberitahu bahwa mereka di tahan karena diklasifikasikan sebagai seseorang yang ‘mencurigakan’, ‘tidak bisa di percaya’, atau ‘teroris’ bahkan hingga ‘ekstremis’ (International, 2021). Seorang warga Uighur, bernama Kairat Samarkan yang pernah dikirim ke kamp *re-education* hanya karena memiliki dua kewarganegaraan dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negaranya (Martins, Fretes, & Seba, 2023). Kairat telah dibebaskan pada bulan Februari 2018 dan kemudian menceritakan pengalamannya selama berada di kamp *re-education* kepada *Amnesty Internasional* bahwa tangan dan kakinya diikat dan dia dipaksa untuk berdiri dengan tap selama 12 jam. Diketahui juga melalui cerita Kairat, bahwa terdapat sekita 6.000 orang lainnya mendapatkan tekanan untuk mempelajari pidato Partai Komunis Tiongkok (Martins, Fretes, & Seba, 2023).

Merujuk pada uraian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah untuk merubah arah kebijakan luar negeri terkait isu Uyghur yang sebelumnya memiliki nama kebijakan *Uyghur Human Rights Policy* menjadi kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* sebagai bagian dari respons terhadap dinamika politik dan hak asasi manusia yang berkembang. Dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri ini, diharapkan dapat memberikan efek jera atau sanksi kepada Tiongkok yang sebelumnya sempat tertunda pada masa kepemimpinan Donald Trump.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan luar negerinya, khususnya terkait isu Uighur, tidak terlepas dari berbagai faktor internasional yang saling memengaruhi. Faktor global seperti tekanan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjadi pendorong utama. Di tingkat regional, stabilitas kawasan Asia Tengah dan hubungan dengan negara-negara sekitar

Xinjiang turut menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, faktor bilateral yang mencakup hubungan langsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok memainkan peran krusial dalam menentukan arah kebijakan. Tidak kalah penting, peran aktor non-negara seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional* turut memberi tekanan moral dan politik yang signifikan. Seluruh faktor tersebut secara kolektif mendorong Amerika Serikat untuk menyesuaikan pendekatan luar negerinya demi menjaga citra, kepentingan strategis, dan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan Amerika Serikat mengambil langkah untuk merubah arah kebijakan luar negeri terkait isu Uyghur yang sebelumnya memiliki nama kebijakan *Uyghur Human Rights Policy* menjadi kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* sebagai bagian dari respons terhadap dinamika politik dan hak asasi manusia yang berkembang. Dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri ini, diharapkan dapat memberikan efek jera atau sanksi kepada Tiongkok yang sebelumnya sempat tertunda pada masa kepemimpinan Donald Trump. Refleksi teoretik dari penelitian ini menguatkan kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri milik Jaokim Eidenfalk, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian lanjutan. Penulis akan meneliti efektivitas konkret dari kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* terhadap praktik kerja paksa dan kondisi HAM di Xinjiang. Selain itu, studi komparatif terhadap kebijakan luar negeri negara lain yang merespons isu Uighur, seperti Kanada, Inggris, dan Uni Eropa, dapat memperluas perspektif dalam memahami respons internasional terhadap pelanggaran HAM Uighur.

Daftar Pustaka

- America, T. V. (2021). *Human Rights Watch Calls Out China's 'Crimes Against Humanity' Toward Uyghurs* . Retrieved from VOA News: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_human-rights-watch-calls-out-chinas-crimes-against-humanity-toward-uyghurs/6204778.html
- Antoni, H., M, I. A., S, A. R., & Zilvania P, S. (2022). Analisis Perspektif Hukum Pidana Inetrnasional Bagi Warga Uighur Atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan oleh China Menurut Statuta Roma. *Jurnal De Jure*, Vol 6(1): 9-25.

- Axios. (2020). *Exclusive: Trump held off on Xinjiang sanctions for China trade deal*. Retrieved from Axios Politics & Policy: <https://www.axios.com/2020/06/21/trump-uyghur-muslims-sanctions>
- BBC. (2018). *Muslim Uighur di Cina: Persekusi melalui kamp 'pendidikan-kembali'*. Retrieved from BBC Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45835871>
- BBC. (2020). *Trump tunda beri sanksi ke China atas 'tuduhan penyiksaan Uighur' demi 'perjanjian dagang'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53146120>
- BBC. (2022). *Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>
- Bhattacharji, P. (2012). *Uighurs and China's Xinjiang Region*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/uyghurs-and-chinas-xinjiang-region>
- Diplomat, T. (2023). *The Uyghur Human Rights Policy Act is US Law. Where Are the Sanctions?* Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/06/the-uyghur-human-rights-policy-act-is-us-law-where-are-the-sanctions/>
- Eidenfalk, J. (2006). *Towards a New Change of Foreign Policy Change*. University of Wollongong Press.
- GAO. (2024). *U.S. - China Relations*. Retrieved from U.S. Government Accountability Office: <https://www.gao.gov/u.s.-china-relations>
- Gov, C. (2020). *S.3744 - Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* . Retrieved from Congress. Gov: <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744>
- International, A. (2021). *"Like We Were Enemies in a War" - China's mass Internment, Torture and Persecution of Muslims in Xinjiang*. Retrieved from Amnesty International: <http://xinjiang.amnesty.org/>
- Martins, A. O., Fretes, C. H., & Seba, R. O. (2023). *Perspektif Amnesty Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Etnis Uighur Di Tiongkok Tahun 2016-2021*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5(2): 2399-2413.
- Moh. Fathoni Hakim, Denimah, Bahtiar, D. F., Ramadhan, M. Z., Airlangga, F., & Putra, S. J. (2021). *Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki atas Perundingan Etnis Uighur*. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 14(1): 158-174.
- Nations, U. (2022). *China responsible for 'serious human rights violations' in Xinjiang province: UN human rights report*. Retrieved from United Nations: <https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932>
- Silalahi, U. (1999). *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya Bandung.

- State, U. D. (2024). *Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Fact Sheet* . Retrieved from U.S Department of State: <https://www.state.gov/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/releases/2025/01/uyghur-forced-labor-prevention-act-uflpa-fact-sheet>
- Supriyadi. (2016). COMMUNITY OF PRACTITIONERS : SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI PENGETAHUAN ANTAR PUSTAKAWAN. *Lentera Pustaka*, Vol 2(2): 83-93.
- Watch, H. R. (2001). *CHINA: HUMAN RIGHTS CONCERNS IN XINJIANG*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china-bck1017.pdf>
- Watch, H. R. (2020). *China's Global Threat to Human Rights*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2020>